



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sudarto, S.H
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 76918201
www.fh.undip.ac.id | email: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 2534/UN7.5.1.2.1/DL/2022
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Surat Pengantar Ujian Penulisan Hukum
Gelombang II Periode Maret 2022

08 MAR 2022

Yth. (daftar terlampir)
Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

Berkenaan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 20/UN7.P/SE/2020 serta upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan **ujian penulisan hukum dilaksanakan pada tanggal 21, 22, dan 23 Maret 2022** secara daring via SSO (*Microsoft Teams*) dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk bertindak sebagai penguji penulisan hukum sebagaimana daftar dan bahan ujian terlampir.

Setelah ujian dilaksanakan **para penguji dimohon untuk memberikan nilai dan pembimbing 1 selaku ketua penguji menyatakan lulus/tidak lulus melalui aplikasi SIAP.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan



Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H.

NIP. 197208232000032001

DAFTAR PESERTA UJIAN PENULISAN HUKUM PERIODE BULAN MARET 2022
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Senin, 21 Maret 2022 Hukum Tata Negara

NO	NIM	NAMA	Bidang Minat	Judul Skripsi	Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3	Pukul
1	11000118120170	ERWINA KASIH CRISTAULINA SILALAH	Hukum Tata Negara	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TERHADAP POTENSI PUTARAN KEDUA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Dr. Fifana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum	08.00
2	11000118120182	Geby Arta Uji Hutahayan	Hukum Tata Negara	Analisa Independensi Keuangan Mahkamah Agung Ditinjau dari Teori Pemisahan Kekuasaan dan Hubungan antar Lembaga Negara	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum	Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H., M.Hum	09.00
3	11000118120061	Ahmad Muzaki	Hukum Tata Negara	Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Agung yang Tidak Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	Sekar Anggun Gading Pinih, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H., M.Hum	10.00
4	11000118140324	SALSABILLA DZULOARNAIN	Hukum Tata Negara	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DALAM MEMBERIKAN JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG	Dr. Fifana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.	Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum	10.00
5	11000118140501	Febrian Rizky Nuari	Hukum Tata Negara	Implementasi Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil di Kota Semarang	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.	Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.	Sekar Anggun Gading Pinih, S.H., M.H	11.00
6	11000118140227	Sarah Syafira	Hukum Tata Negara	TUGAS SEKSI EKSPOR DAN IMPOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH	Dr. Fifana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Untung Sri Hardianto, S.H., M.H.	11.00

7	11000118120023	Meilinda Dwi Haryati	Hukum Tata Negara	Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	Iндarja, S.H., M.H.	Diastama A. Ramadhan, S.H.,LLM	13.00
8	11000118120070	Imka Overika Br Silaban	Hukum Tata Negara	Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabanjahe Dalam Pembinaan Lembaga Adat Karo Menurut Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karo	Iндarja, S.H., M.H.	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.	Dr. Amiek Soemarmi, S.H.,M.Hum	14.00
9	11000118130372	M. Afif Zia Ul-Haq	Hukum Tata Negara	Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019 Perihal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dr. Fifiانا Wisnaeni, S.H., M.Hum	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum	15.00
10	11000118120081	WINA FARIDA MIRAWATI	Hukum Tata Negara	Penguatan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Utama yang Independen	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.	Iндarja, S.H., M.H.	Dr. Amiek Soemarmi, S.H.,M.Hum	15.00

DAFTAR PESERTA UJIAN PENULISAN HUKUM PERIODE BULAN MARET 2022
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Selasa, 22 Maret 2022 Hukum Tata Negara

NO	NIM	NAMA	Bidang Minat	Judul Skripsi	Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3	Pukul
11	11000118140243	Laksmi Candra Dipyta	Hukum Tata Negara	Implementasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Tegairoso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	Inderja, S.H., M.H.	FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum	Diastama A. Ramadhan, S.H.,LLM	08.00
12	11000118120033	Muhammad Andre Rivandi	Hukum Tata Negara	Tinjauan Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Dr. Fiffana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.	08.00
13	11000118120001	Ruth Grace Napitupulu	Hukum Tata Negara	KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA	Inderja, S.H., M.H.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H., M.Hum	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H	09.00
14	11000117130169	Dian Leonaro Benny	Hukum Tata Negara	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 Terhadap Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/kota	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H., M.Hum	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	10.00
15	11000118140403	Dimas Aditya Pangestu	Hukum Tata Negara	Penetapan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi	Inderja, S.H., M.H.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	Diastama A. Ramadhan, S.H.,LLM	10.00
16	11000118130476	Naufal Arif Aisy	Hukum Tata Negara	Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Dr. Fiffana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	11.00
17	11000118120068	WINDY SHAFIRA ANANDITYA	Hukum Tata Negara	TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Inderja, S.H., M.H.	Dr. Fiffana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H., M.Hum	13.00

18	11010116130380	Gilang Akbar Widyantoro	Hukum Tata Negara	KAJIAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE PEMILU YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH	Dr. Ratna Herawati,SH, MH	Amiek Soemarmi,SH, M.Hu m	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	13.00
19	11000117130196	Nefri Isha Mahendra	Hukum Tata Negara	Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H., M.Hum	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	14.00
20	11000118120071	SAVITRI PRASTUTI DEWI	Hukum Tata Negara	TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN	Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.	15.00